BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, komunikasi adalah elemen penting dalam usaha pengendalian penyakit dan penyaluran pesan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia dibanjiri dengan berbagai informasi yang tersebar melalui media sosial, portal berita *online*, dan saluran komunikasi lainnya. Akibatnya, kebutuhan untuk komunikasi strategis yang tepat, persuasif, dan berdasar data menjadi semakin krusial, khususnya dalam sektor kesehatan masyarakat. Komunikasi yang efektif terkait dengan masalah kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai penyakit dan tindakan pencegahan. Hubungan masyarakat pemerintahan (Humas Pemerintahan) adalah garda terdepan dalam mengkomunikasikan program serta pencapaian pemerintah. Kini, humas pemerintahan tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mengatur opini publik, menciptakan citra positif instansi, serta berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Humas juga berperan sebagai penyampai informasi utama yang dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menghadapi tantangan serta dinamika zaman, terutama dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat. Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center (Garvera, 2015), hubungan masyarakat adalah fungsi mengelola sikap publik, menentukan kebijakan dan prosedur untuk satu orang atau organisasi untuk kepentingan publik, serta perencanaan dan implementasi program untuk mendapatkan pemahaman, pemahaman, dan dukungan publik.

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang berperan strategis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Ditjen P2 Kemenkes RI memiliki tanggung jawab besar

Aktivitas Hubungan Masyarakat..., Tri Artha Gracia Taekz, Universitas Multimedia Nusantara

dalam menyusun dan menyampaikan kebijakan berbasis bukti yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan. Oleh karena itu, Ditjen P2 memerlukan dukungan komunikasi publik yang efisien supaya informasi mengenai program kesehatan dapat diterima, dimengerti, dan diterapkan oleh masyarakat secara luas agar pesan kesehatan disambut oleh berbagai tingkat masyarakat.

Salah satu unit di Ditjen P2 yang melaksanakan fungsi komunikasi itu adalah Tim Kerja Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Penanganan Penyakit. Di dalam tim kerja ini terdapat salah satu bagian yaitu Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat (Hukormas). Humas tersebut berperan penting yaitu bertanggung jawab untuk merancang strategi komunikasi kesehatan, mengelola media informasi publik, dan memastikan bahwa informasi yang disebarkan bersifat mendidik, tidak menciptakan kepanikan, serta sesuai dengan standar komunikasi risiko kesehatan masyarakat.

Sebagai mahasiswa komunikasi strategis yang sedang magang di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) dengan posisi hubungan masyarakat (humas), memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan. Sehingga dapat mempraktikkan langsung pada posisi magang yaitu di divisi humas untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep-konsep komunikasi yang ada pada bidang hubungan masyarakat (humas) seperti *copywriting for public relations*, komunikasi risiko, *media monitoring*, dan pengelolaan reputasi dalam dunia nyata kerja, terutama di sektor birokrasi pemerintahan kesehatan. Melalui pengalaman langsung ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan di lembaga pemerintah dan bagaimana menerapkan proses komunikasi dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat melalui media digital yang ada. Selain itu, magang ini juga memberikan pengalaman dalam mengembangkan konten edukatif, berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memahami mekanisme komunikasi dalam peralatan birokrasi pemerintah. Selain itu, *World Health Organization (WHO)* juga menegaskan bahwa komunikasi risiko dan partisipasi

masyarakat merupakan elemen penting dalam respons kesehatan masyarakat yang berhasil (WHO, 2021). Oleh sebab itu, kemampuan Humas pemerintah dalam menyusun pesan komunikasi publik yang jelas, tepat, dan berbasis empati menjadi faktor utama keberhasilan program kesehatan nasional.

Pada tahun 2024 tepatnya tanggal 17 Desember 2024 di Jakarta, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia telah berhasil meraih kategori "Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kategori "Informatif" adalah pencapaian tertinggi dalam mengevaluasi pengungkapan informasi.

Gambar 1. 1 Penyerahan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024
Sumber: https://kemkes.go.id/eng/kementerian-kesehatan-raih-predikat-informatif-dalam-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-2024

Dalam penghargaan ini, Kemenkes RI telah berhasil atau mencerminkan dedikasi untuk memberikan informasi yang jelas, tepat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa peran humas, termasuk di Ditjen P2 telah berkontribusi secara signifikan dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya.

1.2 Rumusan Masalah Pelaksanaan Kerja Magang

Berdasarkan pelaksanaan magang, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kerja yang dijalankan pada posisi Hubungan Masyarakat

(Humas) di Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI?

2. Bagaimana penerapan kemampuan dan pengetahuan mengenai konsep-konsep komunikasi pada posisi hubungan masyarakat (humas) dalam mendukung kegiatan komunikasi publik di Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI?

1.3 Tujuan Pelaksanaan Magang

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan pelaksanaan kerja magang yang memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas hubungan masyarakat di Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Secara khusus, tujuan pelaksanaan magang ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses kerja pada posisi Hubungan Masyarakat (Humas) di Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI.
2. Mengimplementasikan kemampuan dan pengetahuan tentang konsep-konsep komunikasi pada posisi hubungan masyarakat (humas) dalam mendukung kegiatan komunikasi publik di Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

1.4 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.4.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas pelaksanaan kerja magang berlangsung pada 24 Februari 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 dengan durasi enam ratus empat puluh jam kerja sesuai dengan Panduan MBKM Magang Track 1 dan sesuai dengan arahan dari Program Studi.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

1.4.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

1) Mengikuti pembekalan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN.
2) Mengisi KRS *internship* di myumn.ac.id dengan syarat telah menempuh 110 sks dan tidak ada nilai D & E. Serta *me-request* transkrip nilai dari semester awal hingga semester akhir sebelum magang di *www.gapura.umn.ac.id*.
3) Memiliki kesempatan untuk mengajukan KM-01 lebih dari satu kali melalui pengisian *Google Form* di *e-mail* untuk verifikasi tempat magang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Kepala Program Studi.
4) Mengisi dan *submit form* KM-01 pada myumn.ac.id jika sudah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
5) Selanjutnya, mengunduh *form* KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Kehadiran Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), KM-07 (Verifikasi Laporan Magang) untuk kebutuhan proses pembuatan laporan magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

1) Proses pengajuan praktik kerja magang pada tanggal 6 Februari 2025 yang diberikan oleh pihak Direktorat Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI (Ditjen P2 Kemenkes RI) serta mengunggah KM-02 (Surat Pengantar Magang).
2) Proses penerimaan praktik kerja magang di Direktorat Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI dengan menerima pesan lolos seleksi melalui akun *whatsapp* lembaga

pada tanggal 17 Februari dan mendapat surat penerimaan praktik kerja magang pada tanggal 13 Maret yang ditanda tangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit yaitu dr. Yudhi Pramono, MARS.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

1) Praktik kerja magang dijalankan dengan posisi sebagai humas pemerintahan pada Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2) Penugasan dan kebutuhan informasi, didampingi langsung oleh Pranata Humas Ahli Pertama (Madya) Iwan Sopyan Fauzi selaku Pembimbing Lapangan.
3) Pengisian dan penandatanganan *form* KM-03 sampai KM-07 dilakukan pada saat proses praktik kerja magang berlangsung dan mengajukan lembar penilaian kerja magang (KM-06) kepada Pembimbing Lapangan pada akhir periode magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang

1) Pembuatan laporan praktik kerja magang dibimbing oleh Dr. Arsa Widitiarsa Utoyo, S.T., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing melalui pertemuan *online*.
2) Laporan praktik kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.

E. Laporan praktik kerja magang yang telah disetujui diajukan untuk selanjutnya melalui proses sidang.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA